

**IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI ERA REFORMASI DI INDONESIA
MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

AHMAD RIZALDIN ZAMRI

NPM: 1421020047

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI ERA REFORMASI DI INDONESIA
MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

AHMAD RIZALDIN ZAMRI

NPM : 1421020047

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M. H

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketatanegaraan meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi tapi dalam banyak hal negara itu sesungguhnya mengabaikan banyak asas-asas atau prinsip-prinsip demokrasi. Sejarah demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam empat periode, pertama periode 1945-1959 dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer, kedua periode 1959-1969 dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin, ketiga periode 1969-1998 dikenal dengan sebutan Demokrasi Pancasila, dan keempat periode Pasca Orde Baru sampai sekarang yang sering disebut Orde Reformasi dan kemudian demokrasi tersebut dikembangkan tanpa nama atau embel-embel di mana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, pertama bagaimanakah implementasi Demokrasi di Era Reformasi di Indonesia dan kedua bagaimanakah tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Demokrasi di Era Reformasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan Untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sementara kegunaan penelitian ini secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang dan secara praktis penelitian ini dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pembubaran ormas di Indonesia serta untuk memenuhi syarat akademik. Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dan sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif* dan *deskriptif-kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu al-Qur'an, Hadits dan Buku-buku tentang Demokrasi, dan sumber bahan hukum sekunder yaitu Sumber tidak diperoleh secara langsung, mencakup dokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder diperoleh dari referensi, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Implementasi demokrasi pada era reformasi di Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya, hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat diberikan kewenangan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan wakil mereka di parlemen secara langsung, serta diberikannya kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, dan kebebasan pers yang pada rezim sebelumnya cenderung dibatasi. Implementasi demokrasi pada era reformasi di Indonesia jika dilihat dari *siyasah dusturiyah* yaitu bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syura* sebagaimana diajarkan Al-Qur'an. Secara esensi, baik demokrasi maupun *syura* sama-sama menekankan keputusan diambil secara musyawarah, sehingga dapat meminimalisir kekeliruan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Rizaldin Zamri
NPM	: 1421020047
Jurusan/Prodi	: Siyasah Syar'iyah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Demokrasi di Era Reformasi Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 November 2019
Penulis,



Ahmad Rizaldin Zamri
1421020047



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI ERA REFORMASI DI
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

Nama : AHMAD RIZALDIN ZAMRI

NPM : 1421020047

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.

NIP. 1960032919870301003

Agustina Nurhavati, S.Ag., MH

NIP. 197408162003122004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi: IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI ERA REFORMASI DI
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH, disusun
oleh **AHMAD RIZALDIN ZAMRI**, NPM: 1421020047, Jurusan: **Hukum Tata**
Negara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

Sekretaris : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy.

Penguji I : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”
(QS. Asy-Syura: (42) 38).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Risgianto Zamri dan Ibundaku Nur Aina, Ayahanda H. Abdul Azis dan Ibundaku Hj. Restia Ningsih, S.ST. atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis, dengan penuh kasih dan sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada keluargaku yang dimanapun berada, terima kasih atas doa dan support yang telah kalian berikan.
3. Sahabat-Sahabat perjuanganku di UIN Raden Intan Lampung, M. Rahardian Amrullah, Ghozinun Mas'ud, S.H., Peni Fitri Yanti, S.H., Selfi Merliani Marfa, dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Keluarga kedua ku sekaligus tempat ku bekerja N8 Coffee, Sanriomi Sintaro, S.Kom., M.Kom., Niori Primal Wijaya, Ivan Rinaldi, Frans Adi Pradana, dan Maulana Yahya Ayasya.
5. Sahabat-Sahabat KPK Lampung (Komunitas Pecinta Kopi di Lampung).
6. Sahabat-Sahabatku di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Rizaldin Zamri, dilahirkan di Metro pada tanggal 23 Desember 1996, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Risgianto Zamri dan Nur Aina.

Pendidikan penulis di mulai dari tingkat SDN 3 Bandar Jaya lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke SMP N 3 Terbanggi Besar, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke MAN 1 Poncowati, lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Demokrasi di Era Reformasi di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku ketua Program Studi Siyasah.
4. Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I, dan Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Angkatan 2014
8. Teman-teman kelompok KKN 14 (Kuliah Kerja Nyata) Tahun 2018 desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Januari 2020

Ahmad Rizaldin Zamri
NPM. 1421020047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	2
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Siyasah	12
1. Pengertian Fiqh Siyasah	12
2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah	15
3. Konsep Syura dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah	23
B. Demokrasi di Indonesia	29
1. Pengertian dan Tujuan Demokrasi	29
2. Prinsip-prinsip dan Unsur-unsur Demokrasi	35
3. Perkembangan Demokrasi	48
C. Tinjauan Pustaka.....	49

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Sejarah dan Macam-macam Demokrasi Di Indonesia	54
B. Implementasi Demokrasi di Indonesia.....	59

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Demokrasi di Era Reformasi Di Indonesia.....	68
B. Implementasi Demokrasi di Era Reformasi di Indonesia dilihat dari Siyasah Dusturiyah	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Rekomendasi	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul **“Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah”**. Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul dan penelitian ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah, sebagai berikut :

- 1. Implementasi Demokrasi**, Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah bentuk pemerintahan atau sistem sosial yang bertumpu pada kepentingan rakyat dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat.¹
- 2. Era Reformasi**, Periode pasca Era Orde Baru sampai sekarang yang ditandai dengan adanya suatu gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Soeharto atau disebut era setelah Orde Baru.²
- 3. Perspektif Siyasah Dusturiyah**, Melihat sesuatu menurut bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang – undangan Negara, yang dalam hal ini menurut Siyasah Dusturiyah.³

Dari beberapa pengertian istilah tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian tentang penerapan sistem demokrasi pada masa reformasi di Indonesia serta pandangan fiqh siyasah khususnya siyasah dusturiyah terhadap penerapan sistem demokrasi pada masa reformasi di Indonesia.

¹ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara* (Jakarta, 2010), h. 165.

² A. Ubaidillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

³ Ali akhbar, *Siyasah Dusturiyah dalam Perundang – undangan di Indonesia*, (26 juni 2018), <https://kilaskalbar.com>, akses 20 februari 2019 pukul 21.09 WIB.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

- a. Bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang kedudukan rakyatnya sangat penting, Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang penerapan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi.
- b. Memahami dan memperluas wawasan terkait masalah implementasi demokrasi di era reformasi di Indonesia di tinjau dari hukum Islam serta ketatanegaraan Islam (fiqh siyasah). Sebagai wujud untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang implementasi demokrasi di era reformasi di Indonesia,

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang peneliti pelajar di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah
- b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketatanegaraan meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi tapi dalam banyak hal negara itu

sesungguhnya mengabaikan banyak asas-asas atau prinsip-prinsip demokrasi.⁴ Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara kesatuan republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia melalui Undang-undang 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia menganut asas dan sistem pemerintahan demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Dengan demikian berarti juga Indonesia tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan karena masyarakat Indonesia akan menyalurkan aspirasi mereka kepada MPR agar suara merka didengar oleh presiden. Tanpa perlu berorasi dengan melakukan tindakan anarki.⁵

Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaannya sebagai ideologi negara mempunyai banyak makna dan nama, hal ini disebabkan karena banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi masyarakat di dunia. Meluasnya minat untuk menegakan demokrasi terutama dikalangan negara-negara dunia ketiga sejak awal abad 20 menunjukan bahwa partisipasi rakyat yang besar dalam pengambilan keputusan politik adalah sesuatu hal yang sangat didambakan.⁶

Tiga faktor yang menjadi tolak ukur umum dari suatu pemerintah yang demokratis, yaitu : (1) Pemerintahan Dari Rakyat (*government of the people*)

⁴ Nomensen Sinamo., *Hukum Tata Negara....*, h. 163

⁵ *Ibid.* h. 163.

⁶ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif* (Malang: UMM Pres, 2002), h. 15

(2) Pemerintah Oleh Rakyat (*government by the people*) dan (3) Pemerintahan Untuk Rakyat (*government for the people*).⁷

Untuk mendukung terlaksanya demokrasi, perlu didukung oleh enam norma ataupun untuk pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat pluralism yaitu: *Pertama*, Kesadaran akan adanya pluralism, *Kedua*, Musyawarah, *Ketiga*, Sejalan dengan tujuan, *Keempat*, Ada norma kejujuran dan mufakat, *Kelima*, Kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban dan *Keenam*, Adanya *Trial and error* (percobaan dan salah).

Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Makna demokrasi sendiri adalah pemerintahannya dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dan pemerintahan demokrasi dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia ditunjukkan oleh adanya pemilihan umum legislatif secara terbuka yang dilakukan dengan penentuan suara terbanyak (Voting), bebasnya masyarakat dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan media pers dalam berwacana.⁸

Sehubungan dengan adanya hasil penelitian dari UNESCO pada tahun 1949 yang menyatakan bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia karena dianggap sebagai nama paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system of*

⁷ A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 105

⁸ *Ibid*, h.20

political and social organization advocated by influential proponents), maka adalah wajar jika Indonesia menjadikan demokrasi sebagai sistem ketatanegaraannya.⁹

Setelah berakhirnya masa pemerintahan orde baru yang ditandai dengan lengsernya presiden Soekarno pada tahun 1998, bangsa Indonesia kemudian memasuki masa orde reformasi (mulai 1988 hingga saat ini). Perkembangan demokrasi sejak 1998 hingga proses diselenggarakannya Pemilu 2004 telah memberikan sebuah kesempatan untuk mengakhiri sebuah masa transisi demokrasi menuju proses konsolidasi demokrasi.¹⁰

Periode pasca orde baru sering disebut dengan era reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif, dan penuh nuansa HAM, berdampak pada enggannya kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi atas pancasila oleh penguasa orde baru, demokrasi yang hendak dikembangkan setelah kejatuhan rezim orde baru adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel dimana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pasca orde baru erat kaitannya dengan

⁹ S. I Benin Dan R.S Peters, *Principles Of Potical Thought*, (New York: Collier Books, 1964), h. 393

¹⁰ *Ibid.* h. 393.

pemberdayaan Masyarakat Madani (*civil society*) dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh.¹¹

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Unsur penting lain dalam demokrasi adalah keberadaan partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara melalui partai politik.¹²

Sistem demokrasi seperti yang kita ketahui ialah hal dunia, apalagi Indonesia yang mempunyai sistem demokrasi khas ala kearifan local bangsa. Tidak ada satupun regulasi yang tertuang berlawanan dengan prinsip agama dan melangkahi hukum Tuhan. Siyash Dusturiyah yang merupakan kontribusi Islam dalam sistem politik mempunyai prinsip penting mengenai pembentukan pengaturan perundang-undangan, antara lain mengacu pada prinsip nash dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-masafid*.¹³

¹¹ A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 78.

¹² *Ibid*, h. 83-84

¹³ *Ibid*. h. 85.

Istilah demokrasi dalam sejarah Islam tetap lah asing, karena sistem demokrasi tidak pernah di kenal oleh kaum muslimin sejak awal. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan (*al hurriyah*) yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi semenjak jaman Nabi Muhammad Saw, termasuk di dalamnya kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama (*syura*), kebebasan mengkritik penguasa, dan kebebasan berpendapat. Kata *syura* sendiri berasal dari *sya-wara* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.¹⁴

Sejalan dengan pengertian ini, kata syuro atau dalam bahasa Indonesianya menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan syuro merupakan sesuatu yang baik dan berguna dalam kehidupan manusia.¹⁵ Dalam Al-qur'an Allah Swt memerintahkan kepada nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat. Salah satu contoh nabi Muhammad Saw merupakan orang yang demokratis yaitu mendirikan negara Madinah berdasarkan kontrak sosial (*al aqd al ijtima'i*) antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, Kristen, dan kaum Arab pagan yang berdiam di Madinah dan membentuk piagam madinah sebagai UUD yang berlaku di Madinah.¹⁶ Hal

¹⁴ Ibnu Manzur, Lisanul Arab, (Bairut: Dar Al-Syadir, 1968), Jilid 4 h.143.

¹⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu, jihad, pengadilan dan mekanisme mengambil keputusan, pemerintahan dalam Islam*, terjemahan Muhammad Yusuf (Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fiqh, 2007), h. 326

¹⁶ Muhammad Iqba, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakkarta: Prenada Media Grob, 2014), h. 214.

ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yaitu sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. ali-Imran (3): 159).*¹⁷

Menurut M. Quraish Syihab dalam tafsir *Al-Misbah*-nya menjelaskan, kata musyawarah berasal dari kata *syawara* yang memiliki arti dasar mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, termasuk mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat seseorang. Oleh karena itu, menurut beliau, musyawarah hanya akan melahirkan sesuatu yang baik dan manis, seperti madu.¹⁸

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diteliti adalah implementasi demokrasi di era reformasi menurut perspektif siyasah dusturiyah, sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan fokus masalahnya sebagai berikut :

¹⁷ Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Alfatih* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009), h. 57

¹⁸ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 685.

1. Bagaimanakah implementasi demokrasi di era reformasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi demokrasi di era reformasi di Indonesia ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi demokrasi di era reformasi di Indonesia.
 - b. Untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi demokrasi di era reformasi di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan semangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Demokrasi.
 - b. Secara praktis penelitian memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi demokrasi di era reformasi serta memenuhi syarat akademik.

G. Signifikasi Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran dan informasi bagi masyarakat umum mengenai implementasi demokrasi di Indonesia pada era reformasi, apakah berkembang semakin baik atau bahkan malah semakin buruk.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang fokusnya pada penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari sebagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Karena penelitian ini terkatagori kualitatif, maka pada dasarnya adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif.²⁰

2. Sumber Data

Dimaksudkan dengan data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka). Sedangkan sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh.”²¹

Sumber-sumber datanya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, Al-Qur'an, Hadits Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, buku-buku fiqh siyasah,
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku tentang Demokrasi, dan literatur lain yang berkaitan,

¹⁹ Ranny Kautun, *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 1985), h. 15.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998, Edisi Revisi IV), h. 114.

- c. Sumber data tersier, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Majalah, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi terhadap sumber-sumber literatur yang tersedia di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, digunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan sosio-histori, sosiologi, politik dan kultural yang melatar belakangi adanya pembahasan demokrasi di era reformasi.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²²

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 42.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Dalam mengartikan *fiqh siyasah*, penulis terlebih dahulu mendefinisikan “fiqh” dan “siyasah” sebagaimana uraian di bawah ini.

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh* merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata *fiqha-yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.¹

Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*fa qa ha*” yang terdapat dalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h. 591.

² Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bandung, Prenada Media: 2003), h. 5.

Pengertian lain, secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah).⁴ Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Sedangkans *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara harfiah kata *as siyasah* berarti: pemerintahan,

³ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh* (Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958), h. 6.

⁴ T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta, Bulan: 1974), h. 26.

pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.⁵

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan,⁶ mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratatan.

Sementara menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁷

⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 41.

⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 22-23.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 3

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf,⁸ mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian *Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian *fiqh* dan *siyasah* tersebut digabungkan dan diambil sebuah pengertian bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Sebelum langsung membahas ruang lingkup objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian *fiqh siyasah* pembahasannya sebagaimana di atas, sedangkan *dusturiyah* sebagaimana uraian di bawah ini.

Sementara *dusturiyah* berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 7.

⁹ *Ibid*, h. 8.

digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).¹⁰

Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, “*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.”¹¹ Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dusturi* dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”¹²

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan

¹⁰ *Ibid*, h. 54.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 52

¹² *Ibid*,

di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹³

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁴

Sementara menurut H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003, h. 46-47.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 178

h. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.¹⁵

Dari batasan-batasan diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.¹⁶

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap”.¹⁷

Sementara mengenai objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang adadi dalam masyarkatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-

¹⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah....*, h. 73-74.

¹⁶ *Ibid*, h. 45-46

¹⁷ T. M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Siyasah Sya'iyah....*, h. 28.

undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan,¹⁹ mengemukakan objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.

Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitive, *tasyri'* adalah

¹⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah....*, h. 73.

¹⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran....*, h. 29.

kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaraan Rosulullah saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri' samawiy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy*.²⁰

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.²¹ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.²²

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 36

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 154

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah....*, h. 47

tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*naqy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).²³

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁴

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral

²³ Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, AL-'ADALAH Vol. XII, No 1. Juni 2014, h. 67.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 48

yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.²⁵

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".²⁶

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.²⁷

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan

²⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 11

²⁶ Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam....*, h. 119

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 157

Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca khulafa' ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.²⁸

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah “Majlis Syura” atau “ ahl al-halli wa al-aqdi” atau seperti yang disebut Abu A’la al-Maududi sebagai “Dewan Penasehat” serta al-Mawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiyar.²⁹

3. Konsep Syuro dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*

Kata “syura” (syura) berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.

²⁸ *Ibid*, h. 158

²⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah....*, h. 76

Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.³⁰

Al-Qur'an menggunakan kata syura dalam tiga ayat. Pertama, surat al-Baqarah ayat 233 yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang harus ditempuh suami istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun. Ini menunjukkan bahwa suami istri harus memutuskan permasalahan anak (termasuk masalah lainnya dalam rumah tangga) dengan cara-cara musyawarah. Jangan ada pemaksaan kehendak dari satu pihak atas pihak lainnya. Adapun ayat kedua dan ketiga, yaitu surat ali Imran ayat 159 dan asy-syura ayat 38 berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Dalam surat ali Imran ayat 159, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.³¹

Ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas akan adanya musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat itu mempunyai petunjuk masing-masing.

a. Surat Asy-syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura (26): 38)³²

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*..., h. 214.

³¹ *Ibid*, h. 214.

³² Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Alfatih*..., h.789.

Surah ini dinamai dengan nama *Asy-Syura* (musyawarah) sebagai penghargaan atas kedudukannya, hal itu ia dianggap sebagai “satu unsur dari beberapa unsur kepribadian penuh keimanan yang benar”, di samping kesucian hati penuh iman, tawakal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji, juga sifat *muraqabah* (pendekatan diri) kepada Allah dengan mendirikan shalat dan solidaritas yang baik lewat jalan musyawarah, juga berinfak di jalan Allah. Di samping itu, juga unsur kekuatan yang dapat menaklukan kezaliman dan agresi. Dan ini termasuk di antara kaidah syariat atau politik keagamaan, sebagaimana ia juga adalah metode yang dikendaki oleh Allah untuk kaum muslimin dalam gerakan masyarakat dan dasar normanya.³³

b. Surat Ali Imran ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah*

³³ Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 52-53.

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran (3) : 159).³⁴

Dalam sebuah hadits disebutkan:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibanding Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. (HR. Tirmidzi)

Mengapa Rasulullah mencontohkan demikian? Karena beliau tahu bagaimana cara menghormati sikap dan pikiran orang lain. Dalam hidup ini kita tak mungkin lepas dari perbedaan pendapat, dan musyawarah merupakan salah satu mekanisme untuk mencairkan perselisihan pandangan agar tak sampai merusak kebersamaan. Hal lain yang perlu dicatat adalah, musyawarah bermanfaat untuk mencapai pada pilihan pendapat terbaik. Dengan saling mengisi kekurangan, saling memberi masukan, potensi untuk terjerumus kepada pilihan pendapat terburuk akan terminimalisasi. Risiko terberat sedapat mungkin bisa dihindarkan.³⁵

Menurut Farid Abdul Khalik, perintah di sana sekalipun ditujukan kepada Rosullulah S.A.W, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk di antara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya

³⁴ Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Alfatih....*, h. 103.

³⁵ Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam....*, h. 56.

kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara juga individu rakyat.³⁶

Sebagai nilai instrumental, musyawarah tidak boleh mengenyampingkan hikmah/kebijaksanaan sebagai nilai dasar. Manifestasi nilai dasar dalam nilai instrumental mungkin terdapat pada poses, substansi dan tujuan. Dalam kaitan ini, proses musyawarah tidak hanya mengarah kepada tercapainya tujuan mufakat (seperti dipahami dalam adagium “musyawarah untuk mufakat”), tapi juga bagaimana proses tersebut memuat substansi dan menuju kepada realisasi nilai hikmat kebijaksanaan. Jika kata terakhir ini pada tataran implikasinya dapat ditafsirkan sebagai kemaslahatan, maka kekuasaan rakyat, dalam perspektif Demokrasi Pancasila, mempunyai korelasi dengan dan mengacu kepada kemaslahatan umum.³⁷

Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara perinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apapun namanya. Dalam lembaga ini boleh jadi para anggotanya melakukan musyawarah secara berkala pada periode tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Keanggotaan lembaga ini juga bisa di batasi jangka waktu tertentu yang disepakati bersama.³⁸

³⁶ Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*..., h. 51.

³⁷ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2002), h. 36

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*..., h. 219.

Dalam pengambilan keputusan, tidak berarti suara terbanyak mutlak harus diikuti. Adakalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas kalau ternyata pendapat tersebut lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas. Sebagai contoh, Khalifah Abu Khalifah Abu Bakar pernah mengabaikan suara mayoritas dalam masalah sikap terhadap para pembangkang zakat. Sebagian besar sahabat senior yang dimotori ‘Umar berpendapat bahwa orang-orang yang menolak membayar zakat kepada Abu Bakar tetap Muslim dan tidak usah diperangi. Sementara sebagian kecil sahabat berpendapat supaya mereka diperangi. Abu Bakar memilih pendapat kedua. Pendapat ini akhirnya disetujui oleh “forum” dan Abu Bakar pun memerangi mereka.³⁹

Sesuai dengan petunjuk al-Quran, Nabi mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya. Beliau sendiri, meskipun seorang Rosul, sering berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal-soal kemasyarakatan. Akan tetapi, dalam berkonsultasi, nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Sering kali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior. Tidak jarang pula, beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau professional. Terkadang, beliau lemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. Selain itu nabi tidak selalu mengikuti

³⁹ *Ibid*, h. 220.

nasihat para sahabat. Hal ini tidak selalu karena beliau mendapat petunjuk dari Allah melalui wahyu.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab pra-Islam yang sudah dipraktikkan sejak lama. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena, menurut Rahman seperti dikutip oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif, syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Hanya saja, al-Qur'an mengubah syura dari sebuah institusi suku yang dilandaskan pada hubungan darah menjadi institusi komunitas yang menekankan prinsip hubungan iman.⁴¹

B. Demokrasi di Indonesia

1. Pengertian dan Tujuan Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos/kratein*” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat yang berkuasa”. Adapun definisi singkat dari demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, penerapan demokrasi di berbagai negara memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing yang dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat yang berperan sebagai rakyat dalam suatu negara.⁴²

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin....*, h. 196.

⁴¹ Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 220.

⁴² H. Kaelan, M.S, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: PARADIGMA, 2005), h. 55

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang telah dikatakan oleh Abraham Lincoln suatu pemerintahan dari, oleh, rakyat dan untuk rakyat. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan (*institutionalization of free dom*).⁴³

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁴⁴
- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan yakni keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau

⁴³ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2003). h. 66-67

⁴⁴ Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 110.

tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.⁴⁵

c. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁴⁶

d. Affan Gaffar, pakar politik Indonesia, memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu secara normatif dan secara empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.⁴⁷

Menurut Nurcholish Madjid⁴⁸ dalam buku berjudul Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi karangan A. Ubaidillah bahwa demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu demokrasi harus diupayakan dan biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup demokratis dapat bersandar pada hal-hal yang telah berkembang, baik secara teoritis ataupun praktik di negara-negara yang menganut sistem demokrasi dan telah

⁴⁵ *Ibid.* h. 111.

⁴⁶ A. Ubaidillah & Abdul rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*..., h. 131-132

⁴⁷ *Ibid.* h. 132.

⁴⁸ A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 134-136

berkembang. Setidaknya ada en norma yang diperlukan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu:⁴⁹

- a. Kesadaran akan pluralisme. Dibutuhkan kesadaran secara aktif akan kemajemukan. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk melindungi dan menjaga hak orang lain untuk diakui keberadannya. Kemajemukan masyarakat Indonesia bisa dijadikan sebagai model potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia.
- b. Musyawarah. Musyawarah mengharuskan adanya kedewasaan dalam diri warga negara Indonesia dalam menerima keputusan-keputusan, negosiasi, kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dalam setiap keputusan bersama.
- c. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Poin ketiga ini menjelaskan bahwa hidup demokratis itu harus memiliki keyakinan cara yang dipilih sejalan dengan tujuan. Demokrasi bukanlah hanya pelaksanaan secara prosedural dengan melihat suara mayoritas seperti pemilu, tetapi harus dilakukan secara anggun, santun, dan beradab, yakni proses demokrasi dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman, dari dan oleh siapapun, melainkan dilakukan secara sukarela, dialogis dan saling menguntungkan.

⁴⁹ *Ibid.* h. 134-136.

- d. Norma kejujuran dalam permufakatan. Masyarakat demokratis dituntut untuk menjalankan seni permusyawaratan yang jujur, sehat dan adil untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan segala pihak. Banyaknya manipulasi dengan cara yang tidak sehat, hal inilah yang menimbulkan demokrasi yang tidak sehat. Karena itu, faktor ketulusan dan keterbukaan dibutuhkan untuk semua warga negara demi terwujudnya demokrasi yang sehat.
- e. Kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikad baik dan kelompok lain.
- f. Trial dan error (percobaan dan salah). Demokrasi merupakan sebuah proses yang memerlukan perbaikan. Demokrasi membutuhkan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam pelaksanaan dalam praktik demokrasi.

Demokrasi yang di anut di Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan. Mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai penafsiran serta pandangan. Tetapi yang perlu kita pahami bersama dan tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi Konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.⁵⁰

⁵⁰ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaannya sebagai ideologi negara mempunyai banyak makna dan nama, hal ini disebabkan karena banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi masyarakat di dunia. Meluasnya minat untuk menegakan demokrasi terutama dikalangan negara-negara dunia ketiga sejak awal abad 20 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat yang besar dalam pengambilan keputusan politik adalah sesuatu hal yang sangat didambakan.⁵¹ Hal ini dapat dilihat pada penggunaan kata demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Uni Soviet yang disebutnya sebagai demokrasi Soviet atau di Indonesia yang awal kemerdekaanya menggunakan istilah demokrasi terpimpin yang setelah itu pada masa orde baru berubah menjadi demokrasi pancasila. Menurut istilah penggunaan kata demokrasi berarti rakyat yang berkuasa.⁵²

Sistem ketatanegaraan Indonesia, beberapa nilai pokok demokrasi konstitusional tidaklah dapat disangkal lagi, dimana dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen hal ini terdapat pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hokum dan bukan atas kekuasaan belaka dan menggunakan sistem konstitusional dimana pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolut.⁵³

⁵¹ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif* (Malang: UMM Pres, 2002), h. 15.

⁵² Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitus*, (Jakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2003), h. 140.

⁵³ Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008), h. 106.

2. Prinsip-prinsip dan Unsur-unsur Demokrasi

a. Prinsip-prinsip demokrasi

Konsep demokrasi dewasa ini dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang juga sarat dengan aspek-aspek subyektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Karena, hal itu sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat.⁵⁴

Demokrasi menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana didefinisikan oleh Abraham Lincoln, salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat, mengahruskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Di samping itu, prinsip dasar demokrasi, menurut Sadek J. Sulaiman, adalah adanya kesamaan antara seluruh manusia. Apa pun bentuk diskriminasi manusia, baik yang berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial, adalah bertentangan dengan demokrasi.⁵⁵

Lebih lanjut, Sadek J. Sulaiman, mantan duta besar Oman untuk PBB, mengemukakan tujuh prinsip utama sistem demokrasi, yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani....*, h. 33

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 220-221.

- 1) Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi, hal ini penting untuk mengontrol agar berjalan dengan benar.
- 2) Pelaksanaan pemilu yang dalam bahasa politik Indonesia *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia) dan *jurdil* (jujur dan adil) secara teratur. Pemilu ini merupakan sarana konstitusional untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.
- 3) Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah.
- 4) Karenanya, sejalan dengan prinsip ketiga, dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peran penting. Rakyat dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya.
- 5) Demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Dengan pemisahan ini akan ada *checks and balance*, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik eksploitatif.
- 6) Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum semua individu harus tunduk di bawah hukum, tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.

- 7) Dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan. Karenanya, semua individu bebas mempunyai hak milik, tanpa boleh diganggu oleh pihak manapun.⁵⁶

Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Abul A'la Maududi yang kemudian dikenal dengan "sosok guru demokrasi". Menurutny, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam Negara demokrasi, pemilik kedaulatan adalah rakyat bukan penguasa. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat.
- 2) Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat. Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa Negara tidak bisa dan tidak boleh menjalankan kehidupan Negara berdasarkan kemauannya sendiri.
- 3) Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas. Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataan, kehendak rakyat bisa berbeda-beda, tidak sama. Dalam hal demikian, berlaku prinsip (*majority rule*). Maksudnya keputusan diambil sesuai kehendak mayoritas rakyat. Namun, keputusan tersebut harus menghormati hak-hak minoritas (*minority rights*).

⁵⁶ *Ibid*, h. 221.

- 4) Jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya meliputi hak-hak dasar. Hak-hak tersebut meliputi: hak mengemukakan pendapat, berekspresi, dan pers bebas, hak beragama, hak hidup, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan perlindungan hukum, hak atas proses peradilan yang bebas. Namun demikian disini berlaku prinsip, hak asasi manusia harus senantiasa dikembangkan (diperbaiki, dipertajam, dan ditambah hak-hak lainnya).
- 5) Pemilu yang bebas dan adil. Prinsip ini menghendaki adanya pergantian pimpinan pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini penting untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tidak diselewengkan. Untuk itu diselenggarakan pemilihan umum (pemilu).
- 6) Persamaan di depan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya persamaan politik. Maksudnya, secara hukum (didepan hukum) setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak boleh ada sikap membeda-bedakan (diskriminasi), entah berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan maupun jenis kelamin.
- 7) Perlindungan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga Negara dari tindakan sewenang-wenang oleh Negara. Misalnya warga Negara tidak boleh ditangkap tanpa alasan hukum

yang jelas, warga Negara tidak boleh dipenjarakan tanpa melalui proses hukum yang terbuka.⁵⁷

- 8) Pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. Pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi. Selanjutnya konstitusi itu menjadi dasar penyelenggaraan Negara yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Itulah sebabnya pemerintahan demokrasi sering disebut “demokrasi konstitusional” dengan demikian, pemerintahan demokrasi dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum (*rule of law*). Itu berarti kebijakan Negara harus didasarkan pada hukum.
- 9) Penghargaan pada keberagaman. Prinsip ini menghendaki agar tiap-tiap kelompok sosial-budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dan dijamin keberadaannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan Negara.
- 10) Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Prinsip ini menghendaki agar kehidupan Negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerjasama dan konsesus. *Toleransi* berarti kesediaan untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda. *Kemanfaatan* berarti demokrasi haruslah mendatangkan manfaat konkret, yaitu perbaikan kehidupan rakyat. *Kerjasama* berarti semua

⁵⁷ Abul A'la-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1988), h. 19

pihak bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam mewujudkan cita-cita bersama. *Kompromi* berarti ada komitmen untuk mencari titik temu diantara berbagai macam pandangan dan perbedaan pendapat guna mencari pemecahan untuk kebaikan bersama.⁵⁸

Lebih lanjut Nurcholis Madjid dalam buku berjudul *Fiqh Siyash Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* karangan Beni Ahmad Saebani bahwa, memandang demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of life*). Berkaitan dengan pandangan tersebut, demokrasi sebaiknya bercirikan pada tujuh substansi di bawah ini:

- 1) Prinsip pentingnya kesadaran majemuk. Ini tidak saja sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi juga menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Masyarakat yang memegang teguh pandangan hidup demokratis harus memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman yang luas.
- 2) Keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah yang menghendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk tulus menerima kemungkinan terjadinya kompromi atau bahkan kalah suara. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menyadari bahwa tidak semua pikiran dan kepentingannya akan

⁵⁸ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani....*, h. 123

diterima atau dilaksanakan. Intinya bahwa *monolitisme* dan *absolutism* adalah bertentangan dengan cara hidup demokratis.

- 3) Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Unkapan tujuan menghalalkan segala cara mengisyaratkan kutukan kepada orang yang berusaha meraoih tujuannya dengan cara-cara yang melupakan pertimbangan moral. Oleh karena itu, pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa tujuan haruslah dicapai dengan cara-cara yang baik atau mengedepankan kebaikan dalam metode.
- 4) Bahwa suasana masyarakat demokratis mempersyaratkan nilai kejujuran dalam proses permusyawaratan. Selain itu, harus juga tersedia factor ketulusan, yakni mengandung makna pembebasan dari *vested interest* yang berlebihan, sehingga akan merusak nilai dan semangat demokrasi itu sendiri.
- 5) Terpenuhinya kebutuhan pokokmasyarakat, yakni pangan, sandang, dan papan. Karena ketiga kebutuhan pokok ini berkaitan dengan dimensi social dan budaya, diperlukan perencanaan social dan budaya. Bahwa warga masyarakat demokratis dituntut untuk memenuhinya secara berencana dan sekaligus mampu dipastikan sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi.
- 6) Adanya kerjasama dan saling percaya antar warga negara untuk saling mendukung secara fungsional. Masyarakat harus dijauhkan dari rasa saling mencurigai secara horizontal yang sering menimbulkan biaya demokrasi yang terlalu tinggi dan tidak efisien. Oleh Karena itu,

dibutuhkan landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.

- 7) Adanya pendidikan demokrasi yang sehat, bahwa nilai-nilai dan pengertian-pengertian demokrasi harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan, sehingga akan tersosialisasikan secara lebih berkualitas kepada masyarakat luas.⁵⁹

Dalam teori kontemporer kontrol rakyat terhadap negara juga dianggap sebagai satu unsur asasi dalam demokrasi. Persamaan hak politik mengandung arti persamaan hak dalam memilih. Kebebasan politik berkaitan dengan tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dalam artinyayang luas. Persamaan hak politik dan kebebasan akan menentukan tingkat partisipasi politik rakyat yang pada gilirannya, akan menentukan kualitas demokrasi. Kedua dasar tersebut, persamaan hak politik dan kebebasan politik, memunculkan hak minoritas berhubungan secara *vis-à-vis* (bertolak belakang) dengan kekuasaan mayoritas. Pada tataran praktis, rekonsiliasi tuntunan kelompok (mayoritas dan minoritas) ini sering sekali tidak tercapai, bahkan mungkin mustahil akan tercapai. Akibatnya, kualitas demokrasi itu sendiri menjadi tidak sejati.⁶⁰

b. Unsur-unsur Tegaknya Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik sangat bergantung kepada

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin....*, h. 132-133.

⁶⁰ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani....*, h. 34-35.

keberdaaan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur-unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain: negara hukum, Masyarakat Madani, dan aliansi kelompok strategis.⁶¹

1) Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*)

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republik* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun, dalam bukunya “*the statesmen*” dan “*the law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.⁶²

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtstaat*” antara lain oleh

⁶¹ *Ibid*

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), h. 395.

Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut “*rechtstaat*” mencakup empat elemen penting, yaitu Perlindungan HAM, Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-undang, dan Peradilan Tata Usaha negara. Sedangkan A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting “*The Rule of Law*” yaitu, *Supremasi of Law*, *Equality Before the Law*, dan *Due Process of Law*.⁶³

2) Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat madani atau *civil society* secara umum bisa diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi sosial yang memiliki ciri-ciri antara lain: kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu samalain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakatinya secara bersama-sama. Di Indonesia, secara hiistoris, upaya untuk merintis lahirnya institusi semacam ini sudah muncul sejak masyarakat kita mulai bersentuhan dengan pendidikan modern, berkenalan dengan system kapitalisme global, dan modernisasi. Pada saat itulah kesadaran masyarakat untuk mendirikan organisasi-

⁶³ *Ibid*, h. 395-396.

organisasi modern mulaitumbuh pada permulaan abad 20. Maka berdirinya Budi Utomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), dan lain-lain, pada batas-batas tertentu bisa dijadikan indikator bagi tumbuhnya *civil society* di Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda.⁶⁴

Perwujudan Masyarakat Madani secara konkret dilakukan oleh berbagai organisai-organisasi di luar negara (*nongovernment organization*) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam praktiknya, Masyarakat Madani dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja lembaga-lembaga negara maupun melakukan fungsi control terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, Masyarakat Madani (*civil society*) sebagaimana negara menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi. Dalam peran demokrasinya, Masyarakat Madani dapat tumpuan sebagai komponen penyeimbang kekuatan negara yang mempunyai kecendrungan koruptif.⁶⁵

Gagasan Masyarakat Madani sudah tentu tidak terbentuk begitu saja dalam format seperti dewasa ini sebagaimana yang kita ketahui. Bahkan pemikiran ini akan terus berkembang akibat dari sebuah proses pengaktualisasian yang bergerak dinamis atas konsep tersebut di lapangan. Bangunan wacana masyarakat madani memiliki rentang waktu pembentukan yang sangat panjang sebagai hasil dari akumulasi

⁶⁴ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani....*, h. vii

⁶⁵ A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi....*, h. 80.

pemikiran yang akhirnya membentuk pola seperti yang dikenal sekarang ini.⁶⁶

3) Aliansi Kelompok Strategis

Komponen berikut yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politiknya. Adapun kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan organisasi masyarakat lainnya.⁶⁷

Sejenis dari kelompok ini adalah kelompok penekan atau kelompok kepentingan (*pressure/interest group*). Kelompok ketiga ini adalah kelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada

⁶⁶ Ismail SM dan Abdullah Mukti, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 112-113.

⁶⁷ A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani....*, h. 80.

kriteria keahlian seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Ilmuan Politik Indonesia (AIP), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan sebagainya. ketiga Jenis kelompok atau asosiasi ini sangat besar perannya terhadap proses demokratisasi sepanjang organisasi-organisasi ini memerankan dirinya secara kritis, independen dan konstitusional dalam menyuarakan misi organisasi atau kepentingan organisasinya. Sebaliknya, jika kelompok-kelompok ini menyuarakan aspirasinya secara anarkis, sektarian, dan primordial, maka keberadaan kelompok ini akan menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi dan bangunan Masyarakat Madani.⁶⁸

Hal yang tidak kalah pentingnya bagi tegaknya demokrasi adalah keberadaan kalangan cendekiawan dan pers bebas. Kaum cendekiawan, kalangan *civitas* akademika kampus, dan kalangan pers merupakan kelompok penekan yang signifikan untuk mewujudkan system demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang akuntabel. Bersamaan dengan kelompok politik, kedua kelompok terakhir ini dapat saling bekerja sama dengan kelompok lainnya untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah manakala ia berjalan tidak demokratis.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, h. 80-81.

⁶⁹ *Ibid*, h. 81

3. Perkembangan Demokrasi

Demokrasi bukan suatu sistem yang baru dikenal dalam 100 tahun terakhir prinsip demokrasi sendiri bahwa manusia sejajar tidak lebih tinggi dari yang lain, justru berasal dari agama- agama ratusan tahun lalu sebelum demokrasi di kenal.⁷⁰ Islam dan demokrasi di Indonesia memiliki hubungan yang erat dikarenakan partai-partai politik (termasuk partai Islam) di Indonesia didirikan sebagai sarana demokrasi bagi rakyat.⁷¹

Pada awal sejarahnya demokrasi hanya dimengerti lewat model partisipasi politik langsung melibatkan seluruh warga yang sudah dewasa dalam suatu proses politik. Proses politik penataan kehidupan bersama ini dikelola secara bersama, dan inilah yang dinamakan oleh Aristoteles sebagai bentuk negara ideal “politeia”, atau yang secara modern disebut oleh Robert A. Dahl sebagai “polyarchy”, sebagai ganti dari istilah yang kemudian lebih populer dengan sebutan demokrasi yang meluas. Jadi, ciri utama demokrasi purba itu adalah adanya pengelolaan bersama oleh seluruh warga polis (negara kota) yang jumlah penduduknya relatif kecil.⁷²

Perlibatan hampir seluruh warga polis dalam proses penataan negara ini belum melahirkan suasana kebebasan dan kesamaan yang 90 menyeluruh bagi seluruh warga negara Yunani purba pada waktu itu. Hal ini terbukti dengan masih adanya diskriminasi politik yang meminggirkan hak kaum perempuan dan kalangan budak, maupun anak-anak. Perempuan dan budak

⁷⁰ Frans Magnis Suseno dkk, *Agama dan Demokras* (Jakarta:Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), h 23-27

⁷¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3 ES) cetakan 1, h. 110

⁷² Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.43

dianggap tidak memiliki hak dalam partisipasi politik pengelolaan negara. Mereka tidak memiliki kebebasan yang penuh dan dipandang sama statusnya baik dihadapan hukum maupun „pemerintah bersama“ waktu itu. Namun demikian, nilai kebebasan dan kesamaan (persamaan) hak mengeluarkan pendapat itu dipraktikkan secara relatif baik pada seluruh warga polis yang dewasa, walaupun ada pengecualian bagi perempuan dan budak. Perempuan, budak, dan anak-anak serta orang asing tidak memiliki hak politik di dalam pengelolaan polis tersebut.⁷³

Sejarah demokrasi juga tidak dapat dilepaskan dari masalah pembahasan mengenai bentuk pemerintahan negara (*form of government*). Peninjauan masalah bentuk negara merupakan pembahasan mengenai, dalam bentuk apa organisasi negara itu menjelma dalam masyarakat. Berdasarkan teori kenegaraan pembahasannya merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan yuridis. Dari segi sosiologis yang melihat bangunan negara sebagai suatu kebulatan (*Ganzheit*), maka pembahasannya adalah mengenai bentuk negara. Akan tetapi, ditinjau dari segi yuridis yang melihat bangunan negara dalam strukturnya/isinya, maka pembahasannya adalah mengenai bentuk atau sistem pemerintahan.⁷⁴

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*preliminary reasearch*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi.

⁷³ *Ibid*, h. 44

⁷⁴ *Ibid*, h. 46.

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis menemukan beberapa judul yang membahas tentang demokrasi, kemudian melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Robert Nando dengan judul skripsi "*Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid*" di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Islam dan demokrasi menurut M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid bagi keduanya persoalannya bukan sekadar demokrasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, tetapi lebih dari itu, pembentukan masyarakat atau negara yang adil dan egaliter seperti yang dikehendaki Islam, untuk zaman sekarang hanya mungkin diwujudkan melalui sistem negara demokrasi.⁷⁵

Persamaan dan perbedaan pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan demokrasi di Indonesia, persamaannya yaitu karakteristik pemikiran Gus Dur dan Amien Rais berangkat dari Syari'ah. Hanya saja Gus Dur lebih suka menjadikan syari'ah sebagai social ethics dan berfungsi komplementer, sementara Amien Rais cenderung menjadikan syari'ah sebagai "ideologi alternatif". Sedangkan perbedaannya yaitu Perbedaan paradigma pemikiran Amien Rais dan Abdurrahman Wahid dalam konteks tertentu mempunyai implikasi yang berbeda, khususnya dalam merumuskan hubungan Islam (syari'ah) dan demokrasi. Meskipun

⁷⁵ Robert Nando, "Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid". (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h. 82.

sama-sama menolak syari'ah dijadikan sebagai konstitusi negara, tetapi lebih menerimannya sebagai patokan moral-etik kehidupan bernegara, Amien Rais membela demokrasi untuk melindungi syari'ah dari penyelewengan atau distorsi dan detereorisasi. Sedangkan Abdurrahman Wahid mendukung demokrasi liberal justru lebih sebagai sebuah keharusan untuk melindungi pluralisme masyarakat bangsa.⁷⁶

2. Siti Marwah dengan judul skripsi "*Islam dan Demokrasi di Indonesia Era Reformasi: Studi Terhadap Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid dan Prof. Dr. H. Ahmad Syafii*" di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Pemikiran kedua tokoh tentang Islam dan demokrasi di Indonesia khususnya pada era reformasi berdasarkan pada ajaran Islam bukan semata-mata pemahaman mereka sendiri tentang demokrasi tanpa ada pijakan apapun. Penerimaan kedua tokoh tersebut dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia karena di dasarkan pada pemahaman mendalam atas Islam dan sosio kultural bangsa Indonesia. sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang sesuai dengan kultur Indonesia, tetapi masih diperlukan perbaikan secara terus menerus. Anjuran musyawarah kepada masyarakat Indonesia khususnya bagi kepala negara dan para politik harus diaplikasikan, agar seluruh mendapatkan hak suaranya.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, h. 82.

⁷⁷ Siti Marwah, "*Islam dan Demokrasi di Indonesia Era Reformasi: Studi Terhadap Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid dan Prof. Dr. H. Ahmad Syafii*". (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 86.

Masa depan demokrasi di Indonesia dengan merujuk pemikiran kedua tokoh adalah dengan menerapkan demokrasi etis substantif. Demokrasi etis substantif yang di implikasikan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam penerapan sistem demokrasi, perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku, ras, dan agama. hak minoritas juga harus dibela hal ini tidak lain, untuk mencapai kepentingan bersama tanpa adanya diskriminasi antara satu pihak dengan pihak lain. menerapkan sistem demokrasi yang substantif mampu menjamin kebebasan advokasi dan memiliki nilai etis yang mampu melahirkan keadilan tanpa kekerasan. Sehingga terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁸

Maka dengan demikian dari beberapa skripsi di atas, terdapat perbedaan dengan skripsi yang sedang saya bahas. Skripsi yang saya teliti menganalisis tentang implementasi demokrasi di era reformasi di Indonesia menurut perspektif *siyasah dusturiyah*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa implementasi demokrasi pada era reformasi di Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya, hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat diberikan kewenangan untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum, serta diberikannya kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, dan kebebasan pers yang pada rezim sebelumnya cenderung dibatasi. Namun masih ada kekurangannya seperti kebebasan berpendapat yang sering digunakan secara berlebihan atau kebablasan serta pemerintah sendiri yang sering kali mengabaikan aspirasi

⁷⁸ *Ibid.* h. 86.

masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan. Implementasi demokrasi pada era reformasi di Indonesia jika dilihat dari *siyasah dusturiyah* yaitu bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syura* sebagaimana diajarkan Al-Qur'an surat asy-Syura ayat 38. Secara esensi, baik demokrasi maupun *syura* sama-sama menekankan keputusan diambil secara musyawarah, sehingga dapat meminimalisir kekeliruan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Alfatih*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009.

Buku

A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Jakarta: Tiara Wacana, 1994.

Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Bandung: Bulan Bintang, 2003.

Abul A'la-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1988.

Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3 ES, 2006.

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3 ES, 2007.

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2014..

Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bandung, Prenada Media: 2003.

Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang: 2003.

Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2003.

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Frans Magnis Suseno dkk, *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 2001.
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- H. Kaelan, M.S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: PARADIGMA, 2007.
- Hasan Suryono, *Ilmu Negara*, Surakarta: UNS, 2005.
- Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, t. Tp.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Ibnu Manzur, *Lisanul arab*, Bairut: Dar Al-Syadir, 1968.
- Ismail SM dan Abdullah Mukti, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008.
- M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2002.
- M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1998.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014.

Munawir Sajali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI press, 1991.

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, 2010.

Ranny Kautun, *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.

S.I Benin Dan R.S Peters, *principles Of Potical Thought*, New York: Collier Books, 1964.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 1985.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, Edisi Revisi I.V

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, Malang: UMM Pres, 2002.

Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta, Bulan: 1974.

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu “jihad, pengadilan dan mekanisme mengambil keputusan, pemerintahan dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Dan Darul Fiqh, 2007.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Jurnal

Farid Wajid Ibrahim, “Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civil Education”. *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. XIII, NO. 1. Agustus 2012.

Hartuti Purnaweni, *Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 3 No. 2, UNPAR, 2004.

M. Fachri Adnan, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Pada Era Demokrasi*, Demokrasi, Vol. IV No, 1 Th. 2005.

Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, AL-‘ADALAH Vol. XII, No 1. Juni 2014.

Sumber *on-line*

Ali akhbar, “Siyasah Dusturiyah dalam Perundang – undangan di Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://kilaskalbar.com> (20 Juni 2019).